

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) TERMINAL DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN TERMINAL
DURI BESTARI DI KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

AGUS SUPRIANTO
NPM :177310583

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Edit dengan WPS Office

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas segala rahmat dan juga atas takdirmu saya menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya.

Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, mereka yang selalu memberi semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk karya ini, maka saya persembahkan untuk Ayahanda saya yang tercinta **HDENI MULYA** dan Ibunda tesayang **SUPARNI**. Apa yang telah saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata kalian. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karya skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu dan semoga dapat membahagiakan kalian. Selanjutnya saya persembahkan untuk Kakak saya **MITA NURJANAH** dan adik saya **TAUFIQ ALHAKIM** yang luar biasa dalam memberikan bantuan dan semanPgat yang kalian berikan, walaupun di saat dekat kita bertengkar tapi saat jauh kita saling merindukan.

Kepada bapak Dr.H.PANCA SETYO PRIHATIN.,S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing saya yang baik hati dan bijaksana, terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya yang dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas bantuan, nasehat dan ilmu yang diberikan semoga menjadi amalan dan pahala yang terus mengalir kedepannya.

Ucapan terimakasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu pemerintahan kelas IP.I , khususnya untuk Senior Rani Puji Astuti S.Ip dan teman yang selalu mengingatkan saya dan membantu saya selama berkuliah Yufis aryo yuba, Amir Bhakti Sutanto, Nanda Bima Prasetya, Riswanto dan Fauzan Terimakasih

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : AGUS SUPRIANTO
NPM : 177310583
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal
Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri
Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Usulan Penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Turut menyetujui
Program Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.Ip., M.Si

Pekanbaru, 25 Maret 2021
Pembimbing

Dr.H.Panca Setyo Prihatin.,S.Ip., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Agus Suprianto
NPM : 177310583
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal
Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal
Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar.

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Ketua,

Sekretaris

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.Sos.,M.Si
S.Sos.,MA

Rijalul Fikri,

Anggota

Dr. Sri Maulidia, S.Sos.,M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agus Suprianto
NPM : 177310583
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal
Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal
Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademisi, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.Sos.,M.Si
S.Sos.,MA

Rijalul Fikri,

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Indra Safri, S.Sos., M.Si
M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP.,

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini yang berjudul "Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri . Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis". Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang besar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Syfrinaldi,SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas

Islam Riau Khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.Ip., M.Si Sebagai ketua Program studi ilmu pemerintahan yang telah memberikan dukungan Moril kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Dr.H.Panca Setyo Prihatin.,S.Ip., M.Sisebagai dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Seegenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam Penyusunan Penulisan Usulan Peneltian ini.
7. Kepada keluarga tercinta, Ayah saya Hdeni mulya dan juga Ibu saya yang tercinta Suparni dan juga kepada saudari kandung saya Mita nurjanah dan taufiq alhakim yang selalu senantiasa pengertian dan juga kesebarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Penulisan Usulan Penelitian ini
8. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan saya di prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya ilmu pemerintahan.

Dalam Naskah Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca usulan penelitian ini untuk kesempurnaan usulan penelitian ini serta di harapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi Adik-Adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu pengetahuan yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menentukan khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Penulis

Agus Suprianto

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan.....	18
3. Konsep Kebijakan.....	22
4. Konsep Dekonsentrasi.....	24
5. Konsep Otonomi Daerah.....	25
6. Konsep Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan.....	25
7. Konsep Pemerintahan Daerah.....	31
8. Teori Pengawasan.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Piker.....	40
D. Konsep Operasional.....	41
E. Operasional Variable.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan.....	45

D. Teknik Penarikan Informan.....	46
E. Jenis Dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	49
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis.....	49
2. Kondisi Geografi Dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis.....	49
B. Gambaran Umum UPT Terminal Kabupaten Bengkalis.....	54
1. Sejarah Singkat UPT Terminal Kabupaten Bengkalis.....	54
2. Visi Misi UPT Terminal Kabupaten Bengkalis.....	56
3. Tugas Pokok Dan Fungsi UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	57

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan.....	64
1. Usia Informan.....	65
2. Jenis Kelamin Informan.....	66
3. Tingkat Pendidikan Informan.....	67
B. Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	68
1. Pengawasan Pendahulu.....	70
2. Pengawasan Pada Saat Jam Kerja.....	74
3. Pengawasan Feed Back.....	77

C. Hambatan dalam Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	80
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	86
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I.I : Nama Jasa Angkutan Yang Masih Beroperasi.....	6
II.I : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu 39	
II.2 : Operasional Variabel Tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	43
III.I : Informan.....	45
III.II : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	48
IV.I : Daftar Desa Dan Kelurahan Kecamatan Mandau.....	51
V.I : Idenditas Informan Tentang Penelitian Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	65
V.II : Idenditas Informan Tentang Penelitian Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	66

- V.III : Identitas Informan Tentang Penelitian Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....
67
- V.IV : Identitas Informan Tentang Penelitian Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....
68



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.....
9
- Gambar I.2 : Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Perhubungan Jasa Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau.....
12
- Gambar II.I : Krangka Pikir Tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....
41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara	86
2. Dokumentasi Penelitian	89





SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Suprianto
Npm : 177310583
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif Penelitian ini adalah beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi

pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

4.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,31 Mei 2021
Penulis

Agus Suprianto

Agus Suprianto

**FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) TERMINAL DINAS
PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN TERMINAL DURI BESTARI DI
KECAMATAN KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

AGUS SUPRIANTO

kerja, dan pengawasan feedback menunjukkan bahwa pengawasan yang di lakukan oleh dinas perhubungan dalam pengawasan terminal duri bestari belum maksimal di karenakan masih banyaknya angkutan yang melanggar SOP dalam beroperasi Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. Dengan demikian terminal merupakan komonen utama dalam sistem jaringan transportasi

jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting. Tujuan dari pengawasan terminal adalah untuk mengetahui factor penyebab lemahnya pengawasan dan mrngrtshui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengoptimalisasi kembali fungsi Terminal Duri Bestari di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi mengenai pengawasan terminal duri bestari di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis, Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*, yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari informan. Penarikan informan *snowball* menetapkan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk mengambil atau menggantinya dengan informan yang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan indikator pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat.

Kata Kunci : Pengawasan, Aturan

***FUNCTION OF THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (UPT)
OF THE TRANSPORTATION SERVICE TERMINAL IN THE SUPERVISION
OF THE DURI BESTARI TERMINAL
IN MANDAUBENKALIS DISTRICT.***

***ABSTRAK
by***

AGUS SUPRIANTO

Work, and monitoring feedback shows that the supervision carried out by the transportation service in the supervision of the Duri Bestari terminal has not been maximized because there are still many transportation that violate the SOP in operating Terminals are points where passengers and goods enter or leave the transportation network system. Terminal is the

main node in a network where a set of routes as a whole meet. Thus the terminal is the main component in the road transportation network system which has a very important role and function. The purpose of terminal supervision is to determine the factors causing the weakness of supervision and to understand the efforts made by the Bengkalis Regency government to re-optimize the function of Duri Bestari Terminal in Mandau sub-district, Bengkalis Regency. This study used a qualitative method to describe the actual or actual situation regarding the supervision of the bestari duri terminal in Mandau sub-district, Bengkalis district. The technique of withdrawing informants in this study used the snowball technique, which amounted to 4 people consisting of informants. Snowball informant retrieval identifies some people as informants and it is possible to retrieve or replace them with other informants. Based on the research conducted, it can be found that the supervision carried out by the Transportation Agency is based on the indicators of preliminary supervision, on-time supervision.

Keywords: Supervision, Rules

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pemerintahan melaksanakan kebijakan pembangunan disegala bidang secara menyeluruh, termasuk di dalamnya pembangunan dalam bidang transportasi.

Transportasi merupakan spek yang penting dalam pembangunan suatu wilayah, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin padat dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka pergerakan barang dan jasa juga akan meningkat yang harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Sarana dan prasarana transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam aspek social ekonomi, dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dalam suatu system transportasi disuatu wilayah akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila sarana transportasi yang adaberfungsi sebagaimana mestinya.

Pentingnya system transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan umum bagi mobilitas orang dan barang serta berperan sebagai pendorong penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Angkutan umum tidak terlepas

dengan keberadaan terminal yang merupakan tempat penyediaan fasilitas masuk dan keluarnya angkutan umum, tempat pemindahan arus penumpang dari suatu mode angkutan umum ke mode angkutan lainnya untuk kemudahan dan efisiensi pergerakan.

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Terminal merupakan simpul utama dalam jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu. Dengan demikian terminal merupakan komponen utama dalam sistem jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting.

Adapun yang dimaksud dengan Terminal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut :

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta berpindah moda angkutan.

Minimnya pemanfaatan Terminal Duri Bestari dapat dilihat dari belum berfungsinya terminal sebagai terperuntuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dimana sebagian angkutan umum tidak mau masuk terminal, meskipun telah dilakukan beberapa kali penertiban para sopir angkutan umum lebih sering menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Sulitnya pengaturan terhadap pemilik jasa angkutan

umum untuk diajak beroperasi didalam terminal begitu pula dengan pertumbuhan kendaraan roda dua di masyarakat yang semakin meningkat, keadaan ini pada akhirnya akan berdampak pada minimnya retribusi yang diterima.

Kepala terminal harus melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang penting untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Duri Bestari dengan dilakukan pengawasan. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Sondang P. Siagian (2003:112) adalah sebagai berikut :Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, apabila tidak diawasi maka sulit untuk mengoptimalkan Terminal Duri Bestari.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dengantujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat di ringkas menjadi 3 fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), Pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakanya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan di jalankan system desentralisasi ini

brarti daerah di berikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 9 undang-undang no 21 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwapemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemrintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
- b. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan permerintah yang di bagi antara pemerintah pusan dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
- c. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Sementara itu di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah di beri sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu di antaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 undang-undang 23 tahun 2014 urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib di selenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang di berikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

Urusan pemerintah yang wajib tidak berkitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatat sipil
7. Pemberdayaan masyarakat desa
8. Pengendalian penduduk dan perencanaan desa
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistic
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Kepustakaan
18. Kearsipan

Dari sekian banyak urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang di atur oleh peraturan perundang-undangan lainnya adalah menjalankan kewenangan dalam bidang salah satunya adalah melakukan optimalisasi terhadap terminal-terminal guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah karna pada saat sekarang ini, banyak terminal-terminal tidak berjalan dengan semestinya.

Tabel 1.1 Nama Perusahaan Jasa Angkutan Yang Masih Beroperasi Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkali

NO	NAMA PRUSAHAAN	TRAYEK	ROUTE/LINE
1	PO.PURNAMA MANDIRI	ANGKUTAN PEDESAAN	TERMINAL - SIMP.BANGKO - DURI XIII-PP

2	PO.DURI INDAH	ANGKUTAN KOTA	TERMINAL - SIMP.BANGKO - DURI XIII-PP
3	CV.PUTRA MANDAU	ANGKUTAN PEDESAAN	TERMINAL - DSF125 - KULIM – PP
4	PO.RIAU INDAH	ANGKUTAN PEDESAAN	TERMINAL - KULIM- SIMP BANGKO - PP
5	PO.PANSER GROUP	ANGKUTAN KOTA	TERMINAL - SEBANGA - SANTO YOSEP - PP
6	PO.KUD PINGGIR	ANGKUTAN PEDESAAN	TERMINAL - DESA PINGGIR – PP

Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, bahwasannya terdapat 6 perusahaan jasa angkutan yang masih beroperasi saat ini. Akan tetapi masih banyaknya para pengemudi menurunkan dan menaikkan penumpang di pinggir jalan dan mangkal sepanjang jalan kecamatan Mandau. Hal ini membuat kurangnya pengawasan dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal dalam melakukan peneriban angkutan tersebut.

Dampak dari menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Melihat letak terminal bayangan berada di jalan-jalan primer sehingga kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang sangat mengganggu pengguna jalan lain yang melintas di daerah tersebut. Kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal membuat pengoperasian angkutan umum di luar pengawasan dan pengendalian UPT Terminal. Melihat keadaan ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi akan secara terus menerus melakukan penertiban, penataan dan pembinaan. Hal ini akan dilakukan

melalui kegiatan monitoring dan pengawasan secara rutin untuk efektifnya penggunaan Terminal Duri Bestari. Disamping itu Dinas perhubungan Komunikasi dan Informasi akan berupaya meningkatkan kerjasama antar instansi untuk melakukan penertiban dan pengawasan lalu lintas.

Kabupaten bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi riau yang memiliki luas wilayah 7.773,93 km² dengan jumlah penduduk 543.987 juta jiwa dan membawahi 11 kecamatan dengan jumlah kel/desa 155. Wilayah kabupaten bengkalis secara umum dapat diklompokkan menjadi 3 kelompok geografi, yaitu : geografis pulau-pulau pesisir, geografis pesisir dan geografis daratan.

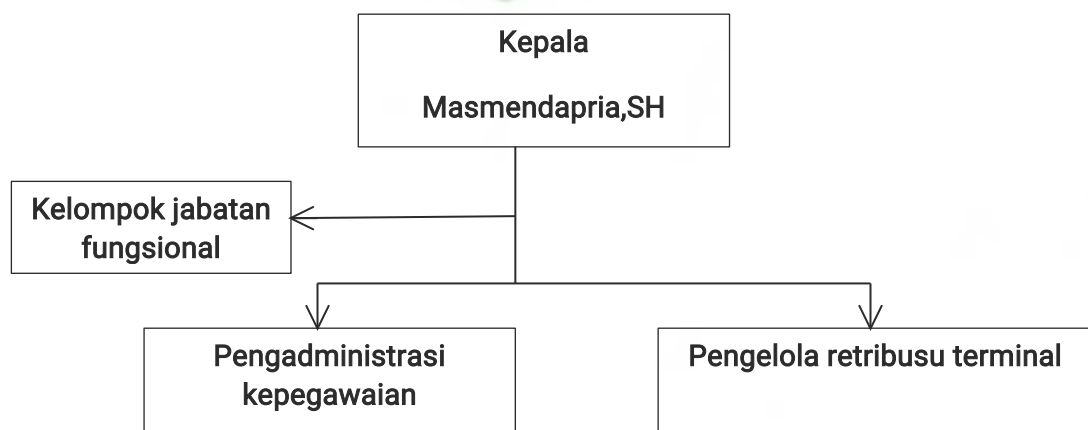
Pada tahun 2017 dengan di tetapkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka

Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkalis menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 (Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis) dengan melaksanakan uraian pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian penyusunan program
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian

3. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
- c. Bidang lalu lintas jalan, terdiri dari :
 1. Seksi manajemen rekayasa dan dampak lalu lintas
 2. Seksi pengawasan, pengendalian operasional lalu lintas
 3. Seksi keselamatan lalu lintas dan angkutan
- d. Bidang angkutan dan pemuatan moda, terdiri dari :
 1. Seksi angkutan orang dalam trayek dan terminal
 2. Seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang
 3. Seksi perencanaan dan pengembangan angkutan
- e. Bidang kepelabuhan, terdiri dari :
 1. Seksi pembangunan pelabuhan
 2. Seksi pengerukan dan reklamasi pelabuhan
 3. Seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan
- f. Bidang pelayaran, terdiri dari
 1. Seksi badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran
 2. Seksi keselamatan pelayaran
 3. Seksi angkutan sungai, danau dan penyebrangan
- g. Unit pelaksanaan teknis
- h. Klompok jabatan fungsional

Gambar 1.1 : Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis



1. SITI FATIMAH,A.MD
 2. DINA HAKIM
 NST,S.SOS
 3. LELY PURNAMA SARI
 4. ADNI

1. SAMSUAR
 2. BINSAR SIMANJUNTAK3.
 3. MUHAMMAD A SIREGAR
 4. RUDIANSYAH
 5. IDRIS
 6. RIO SUSANTO
 7. M. IQBAL ASEGAF
 8. EDI SUSILO
 9. ZULFIQ RHIDO

UPT Terminal merupakan unit kerja structural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan terminas yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan UPT
- b. Pengelolaan terminal meliputi penertiban, pengamanan, dan pengaturan arus lalu lintas
- c. Pemeliharaan sarana dan fasilitas terminal
- d. Pemungutan dan penatausahaan retribusi
- e. Penyelenggara administrasi UPT
- f. Penyelenggaraan kordinasi dengan unit kerja terkit
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Disamping itu berdasarkan peraturan bupati bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 (Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Eselonering tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis)Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga secara structural membawahi 8 UPT Dinas Perhubungan Kabupaten

Bengkalis yaitu :

1. UPT Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT PKB mempunyai klarifikasi kelas A berkedudukan di Duri (wilayah kerja seluruh Kabupaten Bengkalis).
2. UPT Penyebrangan dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Penyebrangan mempunyai klasifikasi kelas B berkedudukan di Bengkalis (wilayah kerja Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu).
3. UPT Terminal dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Terminal mempunyai klasifikasi kelas B berkedudukan di Duri (wilayah kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Mandau dan Kecamatan Batin Solapan).
4. UPT Parkir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Parkir mempunyai klasifikasi kelas A berkedudukan di Duri (wilayah kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Mandau dan Kecamatan Batin Solapan).
5. UPT Pelabuhan Kecamatan Bengkalis dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan klasifikasi Kelas B.
6. UPT Pelabuhan Kecamatan Bantan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelabuhan di

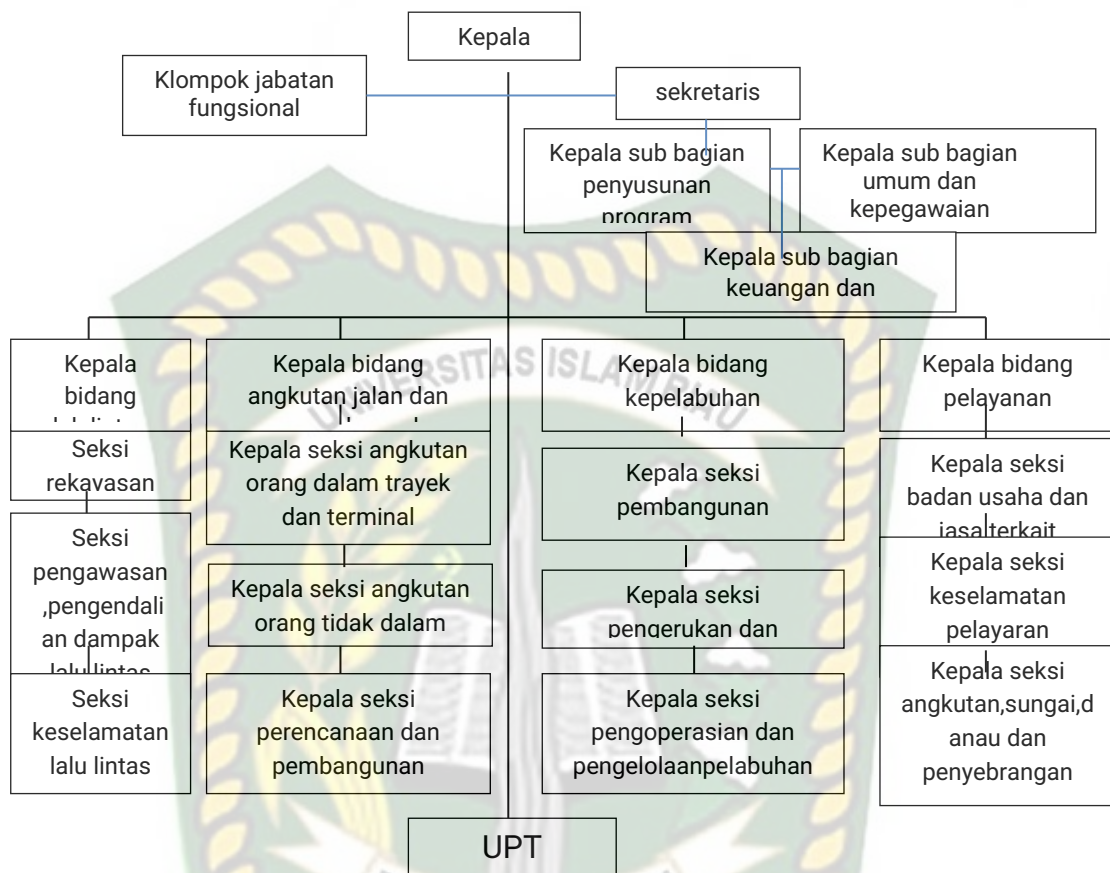
Kecamatan Banatan berkedudukan di Selat Baru dengan Klasifikasi Kelas B.

7. UPT Pelabuhan Kecamatan Rupert dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Rupert berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas B
8. UPT Pelabuhan Kecamatan Rupert Utara dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Rupert Utara berkedudukan di Tanjung Medang dengan Klasifikasi Kelas B.

Tujuan dengan adanya unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah berikut :

- a. Untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di bidang perhubungan
- b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Guna adanya pemerintah pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat dalam segala sector sarana dan prasarana dibidang perhubungan
- d. Mempersingkat garis koordinasi dan birokrasi dalam penanganan masalah secara urgensial yang bersifat mendesak
- e. Merangkai pelayanan terintegrasi antar daerah guna mewujudkan percepatan pembangunan Daerah melalui Transp

Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Perhubungan Jasa Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau



Salah satu terminal yang ada di kabupaten bengkalis adalah Terminal Duri Bestari yang terletak di kecamatan Mandau. Terminal Duri Bestari didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk berpergian dan memperlancar arus kendaraan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi jumlah kontribusi yang di sumbangkan. Memanfaatkan terminal sebagai tempat berpindah, selain itu penulis juga menemukan beberapa fenomena yang ditemui di lapangan diantaranya yaitu :

1. Masih banyaknya angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal

2. Kurangnya jumlah petugas lapangan yang melakukan pengawasan

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di latar belakang diatas maka dapat di rumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui factor penyebab lemahnya pengawasan terhadap Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
- b. Untuk mrngrtshui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengoptimalisasi kembali fungsi Terminal Duri Bestari

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengeahuan penulis di bidang

ilmu social dan ilmu politik khususnya mengenai Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai landasan dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang berarti kata menyuruh melakukan suatu pekerjaan Pamuji (Hasan, 2005 : 1), namun tinjauan asal kata "perintah" sebenarnya berasal dari bahasa Inggris "*government*" yang di terjemahkan sebagai "pemerintahan" dalam banyak tulisan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *government* tidak selalu memiliki makna pemerintahan, karena Samuel Eward Finer mengartikan kata *government* sebagai *public servant* yakni "pelayanan-pelayanan".

Sedangkan menurut Syafiie (2005 : 20) menjelaskan pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta berkharmatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan yang di katakana sebagai suatu di siplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan ajarkan, memiliki objek material maupun formal, universal, sifatnya, sistematis serta spesifisik (khas).

Kemudian Sedarmayanti (2004:9) menjelaskan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dapat menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut CF. Strong (Dalam Hasan, 2005 : 2), pemerintah adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang di beri tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan Negara

Menurut (Musnef,1922 :15), pemerintah adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Di antaranya adalah pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintah umum. Konsep pemerintah lain di kemukakan Budiardjo (2003 : 21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan Negara dan kemerdekaan serta berlandaskan kepada dasar Negara.

Menurut Rasyid (1997:13), pemerintahan mempunyai tugas-tugas pokok, antara lain :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik jika dikerjakan pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam lingkungan hidup.

Rasyid mengemukakan fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu, pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation).

Menurut pengertian dari Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah atas jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Tokoh lain Van poeje (dalam syafiie 2005 : 21), mengemukakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum di susun dan di pimpin dengan sebaik-baiknya, kemudian menurut Ndaraha (2003 : 7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang

diperintahkan akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, (sehingga dapat di terima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa pablik dan layanan sivil.tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya,misalnya sebagai *sovereigh*,sebagai pelanggan,konsumer,yang tidak berdaya,dan sebagainya. pada dasarnya,proses-proses itu komulatif.proses *demand-supply*, produksi-konsumsi, pemasaran “penjualan” distribusi-ekspedisi,”pembelian “ (penerimaan) penggunaan,dan evaluasi – *feedback (feedforward)*, (dalam ndraha,2011;5).

Menurut Ndraha (2011;7) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa pablik dan layanan civil,dalam hubungan pemerintahan , (sehingga dapat di terima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan,sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan,

sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.dalam hubungan ini,bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah indonesia,berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.

Ada beberapa azas pemerintahan sebagai pedoman atau suatu yang di anggap kebenaran,yang menjadi tujuan berfikir dan prinsip yang menjadi pegangan yang perlu diketahui menurut Syafiie (2013;55) antara lain sebagai berikut :

- a. Azas Aktif;
- b. Azas Vrij Bestuur;
- c. Azas Freies Ermessen;
- d. Azas Historis;
- e. Azas Etis;
- f. Azas Otomatis;
- g. Azas Detournement de Pouvir.

Syafie (2013;20) pemerintahan adalah suatu ilmu daan seni.dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan,mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan,adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat,dipelajari dan diajarkan,sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Rosental (dalam syafiie,2013;34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Menurut Braz (dalam syafiie,2013;35) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan,baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Menurut Suryaningrat (1978:2) pemerintah adalah perbuatan atau cara/ urusan pemerintah,pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi.sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan nama lain,pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. pemerintahan secara dominan keilmuan merupakan vagian dari negara namun dalam hal ini disamakan.penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak di gunakan (Nugroho,2003:36).

Menurut ndraha (2005:57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif,sedangkan tugas bersifat subjektif.adapun fungsi pemerintah ada tiga,pertama adalah fungsi pembangunan,kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

Dari penjelasan diatas,jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan,fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan.namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas,pemerintahan menetapkan kebijakann yang disebut kebijakan pemerintahan.

Apa bila ditinjau dari definisi pemerintahan, Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gotok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan.

Kemudian Ndraha (2003:76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan sekunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, disikpolitik dan sosial masyarakat ;semakin meningkatkan kondisi yang diperintah,semakin meningkat fungsi primer pemerintahan.pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikanya dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan bersifat universal,dijalankan oleh semua bangsa dan negara diseluruh dunia,baik negara maju maupun yang sedang berkembang,sesuai dengan kondisi masing-masing. Juga fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pemerintahan sosial dan humaniora, dan di aplikasikan secara luas,baik dibidang privat,public maupun sosial. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi,politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup,semakin kuat *bargaining position* dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah,semakin berkurang fungsi sekunder pemerintahan.

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mempunyai kewenangan hukaum, politis dan finansial untuk melakukannya young dan quin dalam Suharto (2005;44) lebih lanjut di jelaskan bahwa, kebijakan public adalah seprangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang bannyak.

Selanjutnya dapat di lihat pengertian kebijakan public yang dikemukakan oleh winarso (2007;16) bahwa kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekensi-konsensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Ada beberapa ilmuwan politik atau tokoh-tokoh politik yang mencoba untuk mendefinisikan arti kebijakan publik.Salah satu tokoh awal yang mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik adalah Thomas Dye.Thomas Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.Definisi tersebut memang dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik.Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas Dye tersebut.Pertama, Dye berargumen

bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya ketika pemerintah tidak menaikkan pajak yang dianggap sebagai sebuah kebijakan publik juga.

Selain Thomas, ada ilmuwan lain yang mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik secara lebih luas. William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang perlu digarisbawahi yaitu William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Thomas Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya saja ketika pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan terkait kesehatan, maka pemerintah harus melibatkan berbagai aktor seperti departemen kesehatan, keuangan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar.

4. Konsep Dekonsentrasi

Amrah muslimin (2008, 90) mengartikan dekonsentrasi yaitu

pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintahan pusat kepada alat-alat pemerintahan pusat yang ada di daerah . pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan pengertian dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerintahan pemerintah kepada gubernur untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen public yang berorientasi pada kepentingan public dan lebih fleksibel, Alison dalam mahmudi (2010;37) mengidentifikasi tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sector publik maupun swasta :

1. Fungsi strategi meliputi:
 - a. Penetapan tujuan dan prioritas organisasi
 - b. Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
 - a. Pengorganisasian dan penyusunan staf
 - b. Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia
 - c. Pengendalian kinerja
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi
 - a. Hubungan dengan unit eksternal organisasi
 - b. Hubungan dengan organisasi lain
 - c. Hubungan dengan pers dan public

5. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang ditinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hanif nurcolif, 2007:30) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut "daerah otonom," selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.

6. Konsep Organisasi dan Manajemen Pemerintahan.

Secara biasa organisasi merupakan dapat didefinisi sebagai suatu kesatuan untuk karena Organisasi merupakan wadah untuk mendapatkan sasaran ataupun berbagai arahan mengenai organisasi, organisasi mempunyai komponen yang melandasi sekitar terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Pengertian mengenai organisasi berasal dari kata Yunani "Organon", dan kata latin "organum" yang dapat bermakna : alat, bagian, anggota atau badan. Dalam literature dewasa ini, arti organisasi beranekaragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya, sungguh

pun demikian perbedaan arti tersebut dapat kita golongkan kedalam salah satu dari dua pendapat mengenai organisasi tersebut dibawah ini, Menurut Nawawi (2013:73) secara sederhana organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Sedangkan Menurut James D. Mooney (dalam Sutarto, 2006:23) menyatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari penjelasan diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan –hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam ranka usaha mencapai tujuan.

Menurut Robbin (1994:4) menyatakan, bahwa: Organisasi adalah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja

sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Faktor dari penjelasan yang dikemukakan oleh Weber (dalam Thoha, 2005:127) ini adalah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini memiliki unsur-unsur properties sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Dengan demikian seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri, Akan tetapi, mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang ada didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Selain itu pengertian organisasi menurut Dexter Kimball (dalam Sutarto, 2006:23) mengatakan bahwa organisasi merupakan bantuan dari manajemen. Ia mencakup kewajiban-kewajiban merancang satuan-satuan organisasi dan pejabat yang harus melakukan pekerjaan, menentukan

fungsi-fungsi mereka dan merinci hubungan-hubungan yang harus ada diantara satuan-satuan dan orang-orang, organisasi sebagai suatu aktivitas, sesungguhnya adalah cara kerja manajemen.

Mengutip pernyataan Suradinata (2002), manajemen dapat didefinisikan sebagai "kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin" mengenai manajemen secara umum sebagai berikut:

- a. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai.
- b. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain.
- c. Adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tersebut.
- d. Adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu.

Kata manajemen terjemahnya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum adanya kesamaan. Berbagai-bagai pengertian yang dipergunakan seperti: ketalaksanaan, manajemen, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Akhirnya George R. Terry (dalam Manullang, 1992:5) menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan yang lain. Sedangkan Manullang (1992:4) menyatakan manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian

1. Manajemen sebagai suatu proses.
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia.

3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)

Manajemen adalah suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu juga manajemen adalah suatu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sementara hal lain pengertian manajemen juga dikemukakan oleh Millet (dalam Siswanto, 2005:1) bahwa manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberi fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Millet menegaskan bahwa manajemen sebagai suatu proses yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan yang terdiri dari:

- a. Proses pengarahan (*Process of Directing*) yaitu serangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau interaksi dari seseorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.
- b. Proses pemberian fasilitas kerja (*process of facilitating the work*) yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan saran dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seseorang atasan kepada bawahan atau kepada orang lain yang terorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan.

Hal ini juga diutarakan oleh Stoner dan Wankel (dalam Siswanto, 2005:2) bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Stoner dan Wankel (dalam Siswanto, 2005:2) bahwa proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Adapun prosesnya yaitu:

- a. Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
- b. Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta daya lainnya agar dibutuhkan.
- c. Kepemimpinan yaitu mengupayakan bawahan agar bekerja sebaik mungkin.
- d. Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapainya atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Sedangkan menurut Brantas (2009:4) manajemen adalah merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud –maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Manajemen juga bisa diartikan sebagai kekuatan yang rasional dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi kerja serta

produktifitas dan kepuasan. Selain itu manajemen adalah juga merupakan suatu kemampuan atau keahlian manusia untuk mengurus sesuatu kegiatan sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan serta menghadapi perubahan yang terjadi baik perubahan teknologi, persaingan, maupun tautan perkembangannya yang luas. Menyatakan bahwa manajemen pemerintah adalah tidak lain adalah factor upaya dalam sebuah organisasi.

Sedangkan berdasarkan Krittiadi (dalam Nawawi 2013:21) menyatakan bahwa manajemen pemerintah adalah tidak lain upaya dalam sebuah organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakat.

Jadi. Berdasarkan garis besarnya dari berbagai pengertian mengenai manajemen diatas bahwa manajemen adalah kemampuan dalam mengurus suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua. Manajemen adalah hal baru dimana merupakan suatu masalah yang besar setelah permasalahan dan akan faktor dan sumber daya yang paling sulit untuk bisa dikendalikan dan didayagunakan. Masuk ke dalam sebuah persoalan manusianya karena itu manajemenlah yang menentukan cara bagaimana pengendalian manusia itu sendiri.

7. Konsep Pemerintahan Daerah

Sebuah pemerintahan dimana bila dibagi atau dipisahkan, maka akan nampak sebuah perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit ialah sebuah

lembaga yang hanya meliputi mengurus pelaksanaan roda pemerintahan(disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas dimana selain dia eksekutif, tetapi ia juga termasuk sebuah lembaga yang juga ikut berperan dalam membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative), dan yang melakukan adalah sebuah peradilan (disebut yudikatif) (Inu Kencana Syafie,2005:21-22).

Sedangkan menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comperative Government* sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie, mengatakan bahwa arti *government*, paling kurang memiliki empat arti (2005:3-4) yaitu:

- a) Menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan control atau pihak lain (*the activity of the process of ravening*).
- b) Menunjukkan masalah-masalah Negara dalam mana kegiatan atau proses atas dijumpai (*states of affairs*).
- c) Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untyk memerintah (*people changed with the duty of governing*)
- d) Menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan nama suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by witch a particular society is governed*).

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa asas pemerintahan daerah adalah sebuah dasar dalam

permusyawaratan. Jadi pemerintahan daerah mempunyai peranan untuk mewujudkan dan menjaminkannya Demokrasi pancasila sampai kedaerah plosok tanah air. Selain dari pada itu pembentukan pemerintahan daerah bertujuan menciptakan efisiensi, efektivitas dan pemerataan dalam pembangunan nasional, dengan demikianlah mengenai penjelasan umum dalam UU No. 5 Tahun 1974. Hal ini menjadi tanggung jawab besar yang dipegang dan dibebani kepada kepala wilayah.

Mengenai Pemerintahan Daerah telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 pemerintah daerah adalah pemerintah yang dijalankan berdasarkan hubungan pemerintah yang dijalankan berdasarkan hubungan pemerintah yang dibuat atau diciptakan dengan menggunakan teknis desentralisasi, teknis ini lazim disebut asas desentralisasi, Berdasarkan pasal 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1974, menyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan di dalam konteks otonomi daerah, terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dengan berpegangan pada asas penyelenggaraan pemerintahannya.

Bersama adanya keputusan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa keputusan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menjadi peraturan hukum dimana mengatur tugas,

wewenang dan juga tanggung jawab dari Pemerintahan Daerah menjadi dasar Pemerintahan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai pemerintahan daerah maksudnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya yang ada didalam sistem dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sementara penjelasannya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan hukum otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah yang meliputi Gubernur, Bupati. Atau Walikota dan perangkat daerah lainnya dimana sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintaha daerah. Berkaitan dengan hal ini peran Pemerintahan Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekuasaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

8. Teori Pengawasan

Pengawasan (controlling), yakni meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Pengawasan dapat dilakukan secara vertical maupun horizontal, yaitu atasan dapat melakukan pengontrolan kepada bawahannya, demikian pula bawahan dalam melakukan upaya kritik kepada atasannya.

Cara tersebut diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat, pengawasan melekat lebih menitikberatkan kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja.

- a. Penelitian atas hasil kerja sesuai dengan rencana/ program kerja
- b. Pelaporan hasil kerja dan pendapatan berbagai masalah

Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

a. Pengawasan pendahuluan (Preliminary Control)

Pengawasan pendahuluan (Preliminary Control), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. (Donnelly, 1996)

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Cocurrent Control)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (concurrent control) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pengawasan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Donnelly, 1996)

c. Pengawasan feed back (feed back control)

Pengawasan feed back (feed back control) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi

atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi actual. Pengawasan feed back adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. (Donnelly, 1996)

Pengawasan adalah suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan mencapai hasil yang dikehendaki.

Pendapat lain yang di kemukakan oleh Handoko dalam Irham Fahmi (2013:97) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses dan manajemen tercapai. Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial dan ia mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi), pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisiensi dan berjalan lancar

1. Tipe-Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipennya, pengawsan ini memiliki tiga tipe pengawsaan, yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan (steering control) pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-maslah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan

kegiatan (concurrent controls) pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus terpenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat pengawasan ialah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

2. Teknik-Teknik Pengawasan

Untuk dapat mencapai pengawasan yang optimal, diperlukan proses atau langkah pengawasan melalui teknik-teknik pengawasan. Sondang P. Siagian (2003:115) mengemukakan langkah-langkah pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya, pengawasan langsung ini dapat terbentuk:

a. Inspeksi Langsung

Bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan secara langsung mengadakan kunjungan kerja ke tempat kerja para pegawai serta memberikan kebenaran laporan yang diterima

b. One The Spot Observation

Observasi ditempat merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan mengadakan pengamatan pemeriksaan secara langsung ke tempat kerja pegawai yang bermaksud untuk memperoleh informasi yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahan dan selanjutnya pemimpin melakukan tindakan korektif (koreksi)

2. Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh ,pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

a. laporan Tertulis

laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis sulit pemimpin menentukan mana yang berupa pendapat.Keuntungannya untuk pemimpin dapat digunakan sebagai pengawasan untuk menyusun rencana berikutnya.

b. Laporan Lisan

pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta dan

informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian laporan yang disampaikan langsung tatap muka antara bawahan kepada atasan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Judul	Nama	Metode	Teori
Pengolaan terminal Bandar raya payung sekaki oleh unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) terminal dinas perhubungan komunikasi dan informasi kota pekanbaru	Penulis: Christian B. A Gultom Tahun : 2014	Kualitatif	Konsep organisasi dan konsep pengelolaan
Peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal balaraja kabupaten tanggerang priode (2016-2017)	Penulis :Muhamad Aan Burhanudin Tahun : 2018	Kualitatif	Evaluasi kebijakan public
Kebijakan pengoperasian terminal kota lintas muara bungo: dinamika dan permasalahannya	Penulis :Ridwan, Mulia Jaya, Hasrul Mubarak Tahun :2018	Kualitatif	Konsep kebijakan
Evektifitas pengelolaan terminal kortonegoro kabupaten ngawi (studi kasus:unit pelaksana teknis dinas (UPTD) terminal kortonegoro dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten ngawi)	Penulis : Danang Eko Prastya Tahun :2016	Kualitatif	Evektivitas dan pengelolaan
Pengawasan dinas perhubungan komunikasi dan informatika (DISHUBKOMINFO) kota pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar raya payung sekaki kota pekanbaru tahun 2016	Penulis :Muhammad Rangga Sudrajat Tahun : 2016	Kualitatif	Konsep organisasi

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, maka dapat di lihat kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Christian B. A Gultom, Muhammad Rangga, Muhamad Aan Burhanudin dan Danang Eko Prastya adalah pada lokasi penelitian, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Danang Eko Prastya dan Muhammad Rangga Sudrajat adalah dalam penggunaan teori yang ada dalam penelitian tersebut.

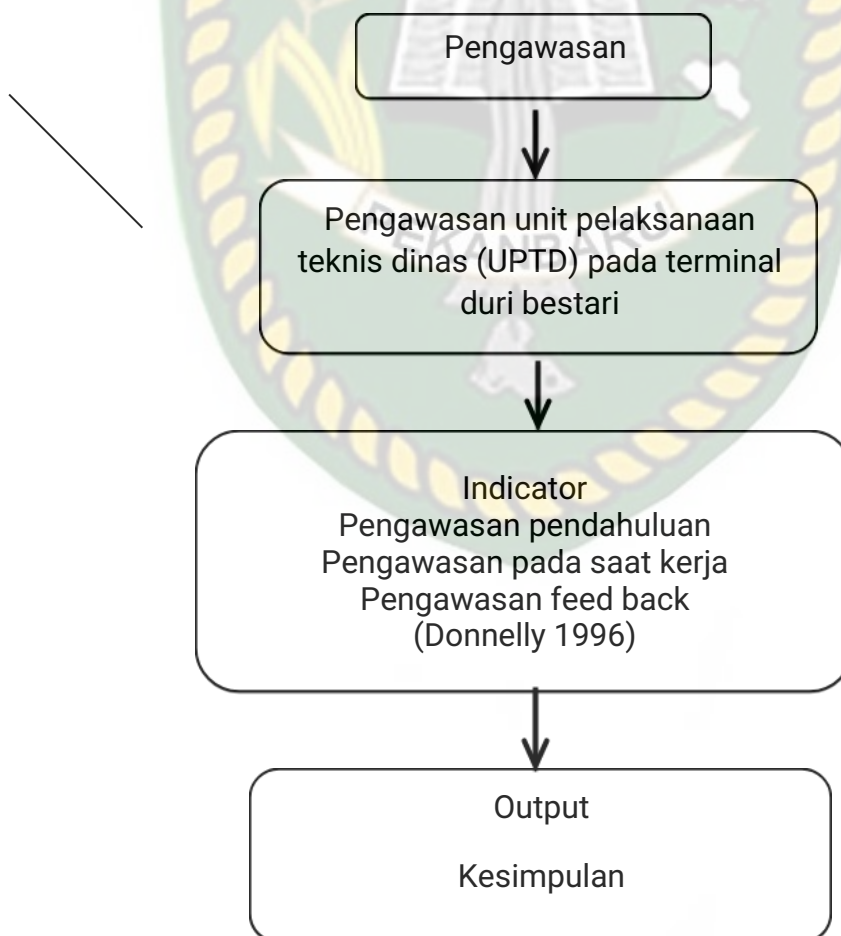
kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai focus penelitian, dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana pelaksanaan peran dari instansi pemerintah, dalam penelitian ini dinas perhubungan (DISHUB) menyangkut tugas pokok dan fungsi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi pemerinta tersebut dalam mengenai suatu permasalahan , dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai metode peneliatan yang di pakai sama-sama menggunakan Metode Kualitatif.

C. Kerangka Pikir

Kerangka piker bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep mteori-teori yang di anggap relevan. Adapun kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini,yang digambarkan dngan

diagram sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis



Sumber : Olahan peneliti 2020

D. Konsep operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan diperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pemerintah adalah prangkat daerah yang ditunjuk untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalanya pemerintahan daerah
- b. Aksibilitas adalah kriteria penilaian yang berdasarkan suatu kemudahan sirkulasi angkutan umum untuk masuk dan keluar di dalam dan di sekitar Terminal, kemudahan dalam sirkulasi yang aman dan nyaman bagi penumpang untuk mendapatkan transit atau pertukaran bus sesuai dengan tujuan perjalanan di dalam lokasi terminal.
- c. Fasilitas dan manajemen terminal adalah kriteria penilaian ini berdasarkan ketersediaan dan pengatur fasilitas yang aman dan nyaman untuk naik dan turun bagi penumpang sesuai dengan lajur menurut tujuan bus, tiketting, tempat menunggu, telepon umum,tempat sholat, toilet umum dan sebagainya.
- d. Keamanan lingkungan adalah kriteria penilaian berdasarkan situasi lingkungan didalam terminal yang aman dari tindak criminal

(pencoper, penodong, pembunuhan, dan tindak criminal lainnya)

- e. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Terminal adalah salah satu UPTD yang mempunyai kewenangan untuk mengatur transportasi yang berada di Terminal.

E. Operasional Variable

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan . Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokan pengawasan menjadi 3 tipe	Fungsi Unit Pelaksana an Teknis (Upt) Terminal Dinas Perhubung an Dalam Pengawas an Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	1. Pengawas an pendahulu an (<i>Preliminary Control</i>)	a. Adanya pengawasan dari setiap kegiatan b. Pengelolaan c. Peraturan-peraturan yang telah di tetapkan
		2. Pengawas an pada saat kerja berlangsung (<i>Cocurrent Control</i>)	a. Bentuk-bentuk pengawasan b. Teguran terhadap pelanggar aturan

<p>pengawasan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pendahuluan (<i>Preliminary Control</i>) b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (<i>Cocurrent Control</i>) c. Pengawasan feed back (<i>feed back control</i>) 		<p>3. Pengawasan feed back (<i>feed back control</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengevaluasi hasil kerja b. Pengawasan kerja c. Biaya yang dikeluarkan penumpang
--	--	---	---

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara holistic. Dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks kusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Bagdon dan taylor dalam moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati. Pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai dari suatau keutuhan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karna Terminal Duri Bestarimerupakan salah satu terminal yang memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan retribusi terminal akan tetapi

pada saat ini terminal tersebut tidak berfungsi dengan semestinya. Kurangnya pengawasan terhadap terminal tersebut dan masih banyaknya angkutan yang menurunkan penumpang di tepi jalan, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan kondisi yang terjadi di Terminal Duri Bestari .

C. Informan

1. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang di tetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu :

- a. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Kabupaten Bengkalis
- b. Supir angkutan penumpang di Kecamatan Mandau
- c. Masyarakat pengguna angkutan umum
- d. Petugas UPT Terminal

Tabel 3.1 Informan

No	Keterangan	Nama	Jumlah
1	Kepala upt terminal	Masmendapria,S.H	1
2	Petugas upt terminal	Binsar Simanjuntak	1

3	Supir angkutan	Mahmud	1
4	Masyarakat	1. Ridwan 2. Risma	2

Sumber : olahan peneliti 2020

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informan, peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu teknik penarikan *snow ball*. Teknik penarikan ini yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk megambil atau menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah di tetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atau jawaban yang diberikannya masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang di butuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang di harapkan.

E. Jenis dan sumber data

1. Data Premier

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Terhadap Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun data premier tersebut adalah identitas

responden serta hasil kuisioner mengenai indikator efektivitas, efisiensi dan responsifitas

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku, dokumen dan data yang telah tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Data sekunder tersebut adalah gambaran umum kabupaten Bengkalis dan gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis serta struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati kondisi-kondisi yang berada di dalam Terminal Duri Bestari.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Terminal Kabupaten Bengkalis

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen – dokumen terkait pengawasan Terminal Duri Bestari, dokumen tersebut diperoleh dari Unit Pelaksanaan Teknis Terminal

G. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penganalisisan secara deskriptif. Setelah data di kumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut di klompokkan dan di sesuaikan dengan jenis data yang di peroleh, selanjutnya akan di bahas dan di analisis dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan di uraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah usulan penelitian semestinya. Adapun rencana kegiatan penelitian, tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Mengenai Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPT) Terminals Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				

NO	Jenis	Bulan dan Minggu ke																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Penyusunan UP	■	■	■														
2	Seminar UP						■											
3	Revisi UP						■	■										
4	Revisi Kuesioner						■	■										
5	Analisis Data									■	■							
6	Bimbingan Skripsi									■	■							
7	Revisi Skripsi											■	■					
8	Acc Skripsi															■		
9	Ujian Skripsi																■	
10	Perbaikan																	■
11	Penggunaan Skripsi																	■

BAB IV

DESKRIPSI LOAKSI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Duri ibu kota Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Duri terletak di kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri berbatasan langsung dengan Dumai di utara, kecamatan Pinggir di selatan, dan kecamatan Rantau Kopar di barat.

2. Kondisi Geografis dan luas wilayah Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera, yang memiliki batas-batas

wilayah :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu & Kota Dumai
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

- 0°56'12" Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara
- 100°56'10" Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari enam desa dan sembilan kelurahan. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan berjumlah sebanyak 66 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 131 orang, sedangkan 65 orang perangkat desa laki-laki. Menurut klasifikasi desa seluruhnya merupakan desa swadaya. Kecamatan Mandau terdiri dari 721 Rukun tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 115 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

Tabel IV.1: Daftar Desa/Kelurahan Kecamatan Mandau

No	Desa/Kelurahan	Nama Kades/Lurah	RT/RW	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Jumlah KK
1	Air Jamban	Daswan, SH	117/22	24.334	22.288	46.622	12.122
2	Babussalam	Tasarjon	49/8	9.030	8.376	17.406	4.549
3	Batang Serosa	Muhammad Rusdy MR, S.STP	16/5	1.774	1.587	3.361	850
4	Balik Alam	Fitrianita Eka Putri, S.Sos	35/10	5.567	5.246	10.813	3.009
5	Duri Barat	Halazmi Julizar, S.STP, M.Si	57/12	8.985	8.286	17.271	4.493
6	Duri Timur	Mohd. Yudi Kurniawan, S.STP	28/6	5.138	4.589	9.727	2.573
7	Gajah Sakti	Ilhami, SH	51/11	7.520	7.056	14.576	3.774
8	Talang mandi	Muhammad Nur Islami	68/15	11.244	10.415	21.659	5.622
9	Pematang Pudu	Ade	71/16	14.510	13.403	27.913	6.955

No	Desa/Kelurahan	Nama Kades/Lurah	RT/RW	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Jumlah KK
		Suwirman, S.STP					
10	Balai Makam	Agus Har	67/12	5.520	5.042	10.562	2.688
11	Harapan Baru	Tarmin	37/9	3.094	2.799	5.893	1.674
12	Petani	Tasaruddin	44/7	3.879	3.582	7.461	2.082
13	Sebangar	Mukhlis	43/10	5.245	4.816	10.061	2.338
14	Bumbang	Abdul Razaq	19/5	2.090	1.924	4.014	1.090
15	Kesumo Ampa	Anita	15/5	3.403	3.094	6.497	1.658
16	Tambusai Batang Dui	Eti Mirani, SH	25/5	6.501	6.003	12.504	3.218
17	Simpang Padang	Subrata	34/6	7.052	6.590	13.642	3.419
18	Pematang Obo	Kasmari		3.251	2.916	6.167	1.525
19	Air Kulim	Amrilazi		3.223	3.015	6.238	1.655
20	Buluh Manis	Syamsul Alam, SH		2.236	2.119	4.355	1.149

No	Desa/Kelurahan	Nama Kades/Lurah	RT/RW	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Jumlah KK
21	Bathin Betuah	Muhammad Nurizan		1.704	1.525	3.229	836
22	Boncah Mahang	Darus, SH		5.499	5.126	10.625	3.167
23	Pamesi	Sadli, S.Sos		1.306	1.159	2.465	641
24	Bathin Sobanga	Dadang Mustari		1.407	1.304	2.711	748
25	Jumlah		776/164	143.512	132.260	275.772	71.835

Sumber:Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis

Selain kaya akan sumber daya minyak bumi itu, tanah yang subur juga menjadi ciri khas dari wilayah ini. Dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian berladang, dengan menanam tanaman palawija seperti kelapa sawit, kelapa, dan juga karet. Di jadikan sebagai lahan perkebunan menjadi salah satu daya pikat yang menarik para perantau untuk menempati wilayah ini. Jumlah penduduk yang meningkat secara tidak langsung juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan hal-hal yang tidak hanya primer, tetapi juga sangat vital bagi kehidupan manusia, yaitu air bersih. Duri merupakan daerah dataran rendah yang dikenal dengan daerah yang memiliki banyak rawa dan berlahan gambut. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh air bersih

yang layak konsumsi bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

a. Kecamatan Mandau Secara Geografis

Kecamatan Mandau secara geografis terletak pada : a. $0^{\circ}56'12$ Lintang Utara s/d $1^{\circ}28'17''$ Lintang Utara b. $100^{\circ}56'10$ Bujur Timur s/d $101^{\circ}43'26''$ Bujur Timur Dengan batas-batas Wilayah :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu & Kota Dumai.
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinggir.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Kecamatan Mandau merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkalis menjadi 3 (Tiga) kabupaten yaitu Kab Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rohil serta 1 (satu) kotamadya Dumai berdasarkan UU No. 16 tahun 1999 dan Perda No. 01 tahun 2003 dengan luas wilayah \pm 937,47 Km². Wilayah Kecamatan Mandau ini terletak pada ketinggian 6 M dari permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya Kecamatan Mandau banyak tanah yang relatif datar apalagi bila diperhatikan fisiologinya dimana tingkat kesuburan tanahnya sangat tinggi sehingga perusahaan besar maupun masyarakat banyak yang melakukan kegiatan perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet.

b. Iklim dan Curah Hujan

Iklim di Kecamatan Mandau yaitu iklim tropis basah, dengan temperatur maksimum 35oC dan minimum 25oC, kelembaban rata-rata pada musim hujan antara 80% sampai dengan 90 % dan pada musim kemarau 60 % - 70%. Musim hujan terjadi sekitar bulan September –

Januari dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Kecamatan Mandau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

c. Peta Daerah Kecamatan Mandau



operasikan

B. Gambaran Umum UPT Terminal Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Singkat UPT Terminal Kabupaten Bengkalis

Sekitar tanggal 01 September Tahun 1991 di bawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Namun dengan berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2001 dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah

dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka di Kabupaten Bengkalis dibentuklah lembaga-lembaga pemerintahan daerah termasuk salah satunya UPT Perhubungan yang secara langsung berada di bawah naungan Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya dengan berlakunya otonomi daerah terjadi beberapa perubahan-perubahan salah satunya terjadi pemisahan antara 3 (tiga) wilayah hukum yaitu kewenangan yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) berada dibawah naungan Departement Perhubungan dan berubah nama menjadi Dinas Perhubungan (DISHUB), kemudian pada 2009 berubah nama menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dan pada akhir 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan kembali, dimana terjadi pemisahan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika. Pada saat ini Komunikasi dan Informatika membentuk lembaga tersendiri sehingga pada saat ini berubah kembali menjadi Dinas Perhubungan. UPTD Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir merupakan instansi yang teretak di jalan Lintas Duri-Dumai KM 14 Kulim Duri.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melakukan upaya penyelenggaraan ketertiban lalu lintas di bidang darat dan penetapan sarana dan prasarana serta peraturan jalan, melakukan upaya pengawasan prasarana komunikasi dan informatika, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap personil Unit Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau. UPT Dinas

Perhubungan bertekad untuk mewujudkan terciptanya tatanan transportasi yang semakin berkualitas antara lain dengan menata sistem transportasi di Kota Duri sebagai daerah kecamatan yang sangat luas yang termasuk kedalam daerah Kabupaten Bengkalis. Dan mengawasi manajemen rekayasa lalu lintas pada beberapa pusat-pusat kegiatan perusahaan yang ada di kota Duri.

2. visi dan misi dari UPT Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Visi UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah :

“Terwujudnya peningkatan pelayanan Trasportasi yang SMART (Selamat, Murah, Andal, Responbility dan Tertib)”.

Sedangkan misi UPT Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bnegkalis adalah :

- a. Mengembangkan kelembagaan dan kewenangan sesuai dengan potensi dan sumber daya manusia.
- b. Mewujudkan layanan transportasi yang efektif dan efesien.
- c. Memberdayakan seluruh potensi trasportasi yang tersedia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya maksud dan tujuan dari UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Maksud UPT Perhubungan kecamatan Mandau
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan.

- b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaa kendaraan bermotor.
 - c. Memeberikan layanan umum kepada masyarakat.
2. Tujuan UPT Perhubungan Kecamatan Mandau
- a. Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman cepat,lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efesiensi. Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut diatas, semua endaraan bermotor yang dioprasikan dijalan harus sesuai dengan perntukannya, memenuhi persyaratan layak jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
 - b. Hasil dari pada pengujian kendaraan bermotor dapat dipertanggung jawabkan. Menjaga prasarana jalan dan jembatan agar tidak cepat rusak.

3. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Sehubungan telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir yaitu:

1. Kepala UPT Perhubungan

Berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis No 24 Tahun 2008 seorang kepala UPT Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Melakukan pengimpunan data-data dibidang perhubungan di Kecamatan Mandau sebagai bahan masukan dalam penusunan program kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- b. Melakukan upaya penyelenggaraan ketertiban perhubungan darat dan penetapan sarana dan prasarana serta pengaturan jalan.
- c. Melakukan upaya pengawasan prasarana komunikasi dan informatika.
- d. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap personil UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor Keur Baru.
- c. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor Keur Baru PT. CPI.
- d. Melaksanakan Pengujian KBM Angkutan Umum (Oplet) dan Keur Ulangan.
- e. Pemeriksaan Kendaraan (Penyidik)
- f. Melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor wajib uji
- g. Membuat laporan pengujian Kendaraan Bermotor :Triwulan, semester dan tahunan.
- h. Mengetik Laporan pengujian Kendaraan Bermotor.
- i. Kearsipan dan Surat - surat Masuk / Keluar.

- j. Mengetik Laporan Sisa Kendaraan Bermotor
- k. Membuat Surat Numpang Uji
- l. Membantu dalam ADM Perizinan

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Seorang kepala Sub Bgaian Kepegawaian UPT Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu:

- e. Melakukan pengolahan surat menyurat kearsipan.
- f. Melakukan pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan
- h. Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan aset Daerah.
- i. Memeriksa dan merekap Laporan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seoran kepala sub bagian dibantu oleh beberapa staf yang meliputi staf bagian Kebendaharaan, Operator Komputer/Registrasi dan Keamanan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

4. Staf Bagian Kebendaharaan dan Penerimaan Barang:

Kebendaharaan:

- a) Melaksanakan kearsipan keuangan.
- b) Melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah Sesuai dengan Perda Kabupaten Bengkalis No. 12 Tahun 2011.
- c) Melaksanakan penyetoran Retribusi Izin Trayek, Pengujian

kendaraan bermotor, Parkir DAN Terminal Angkot Duri Ke Kasda Bengkalis melalui BANK Riau Duri.

- d) Melaksanakan dan membuat laporan keuangan secara periodic dilanjutkan ke Dispenda dan Dishub Bengkalis.
- e) Mengantarkan arsip laporan keuangan setiap bulannya ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas Perhubungan Kec. Mandau-Pinggir.

Penerimaan Barang:

- e) Mengetik laporan bulanan, Triwulan dan semester pengujian kendaraan bermotor.
- f) Membantu bendaharawan penerimaan pembantu mengetik kwitansi (juru pungut/perizinan).
- g) Membantu menerima, mencatat, menyimpan dan menyerahkan Barang Milik Daerah ke Unit Pemakai.
- h) Menghimpun seluruh dokumen, tanda bukti dan membuat laporan seluruh kegiatan pengurusan barang menegai penerimaan, penyimpanan, pengeluaran serta persediaan barang.
- i) Melakukan perhitungan barang (Stock Opname) dan melaporkan secara periodik tentang persediaan Barang.
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas Perhubungan Kec. Mandau-Pinggir.

5. Staf Bagian Operator Komputer/ Registrasi:

- a) Membantu Kasubbag Tata Usaha melaksanakan kearsipan dan surat menyurat.
- b) Melaksanakan pengetikan surat menyurat.
- c) Mengetik perizinan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau-Pinggir.
- e) Mengisi daftar penjelasan dan buku uji.
- f) Menyelesaikan Administrasi Keur baru.
- g) Mencari kartu induk.
- h) Membantu megecap buku uji dan kartu induk.
- i) Menyusun kartu indu yang telah di uji/keur.
- j) Membantu bendaharawan penerimaan pembantu (juru punggut) keur kendaraan bermotor dan membuat laporan.

6. Keamanan

- a) Melaksanakan pengontrolan dan pengawasan lingkungan.
- b) Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor selama 24 Jam.
- c) Melaksanakan penerimaan tamu yang datang ke kantor UPTD pengujian kendaraan bermotor.
- d) Membantu mencari kartu induk.
- e) Membantu megecap Buku Uji dan Kartu Induk.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Dinas Perhubunga Kecamatan Mandau-Pinggir.

7. Petugas Pelaksana Urusan Keur

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis, petugas pelaksana Urusan Keur pada UPTD Perhubungan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Tekhnis Peyelenggaraan Keur sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ditentukan Kepala Dinas.
- b. Melaksanakan Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Kewenangan dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
- c. Membantu pelaksanaan Keur Kendaraan Bermotor
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan Kewenangannya.
- e. Membantu melaksanakan ADM Perizinan.
- f. Menyelesaikan ADM Keur Baru.
- g. Mengisi Daftar Penjelasan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- h. Melaksanakan pengetokan plat uji, pembuatan Plat samping.
- i. Mencari kartu induk
- j. Membersihkan, Membuka dan menutup Gedung Kantor Penyidik KBM
- k. Memeriksa KBM dan mengisi BUBK (Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor)

8. Petugas Pelaksanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Petugas pelaksana Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada UPTD

Perhubungan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jala sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ditentukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
- b. Membantu pelaksanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dijalan serta penyiapan sarana dan prasarana.
- c. Membantu rencana pembangunan sarana dan prasarana fisik dalam peningkatan pelayanan perhubungan darat beserta pemeliharannya.
- d. Membantu penertiban dan pengawasan operasional angkutan.
- e. Membantu ketertiban dan kelancaran kendaraan bermotor dijalan.
- f. Melaksanakan pengendalian operasional perhubungan darat.
- g. Melaksanakan pengawasan terminal Angkot Duri Bestari dalam wilayah Kecamatan Mandau Duri.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada UPTD sesuai kewenangannya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam suatu penelitian sering muncul pertanyaan dari pembacanya, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan penelitian sangatlah wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan, informan dalam penelitian yaitu pemberian informan yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari kepala UPT Kabupaen bengkalis, Anggota UPT Terminal, Supir angkutan, Masyarakat pengguna angkutan.

Dalam penelitian tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini penulis ingin menjelaskan mengetahui identitas informan yang diteliti. Hal ini juga yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

Untuk mengetahui identitas dari informan dapat dilihat pada tabel keterangan di bawah ini yaitu :

Tabel V.I : Identitas Informan penulis tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Masmendapria.SH	Kepala UPT Terminal Duri Bestari	Informan
2.	Binsar Simanjuntak	Anggota UPT Terminal Duri Bestari	Informan
3.	Mahmud	Supir Angkutan Penumpang	Informan
4.	Ridwan	Masyarakat pengguna angkutan	Informan

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 202

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang terdiri dari informan yaitu kepala UPT Kabupaten Bengkalis, Anggota UPT Terminal, Supir angkutan, Masyarakat pengguna angkutan.

1. Usia Informan

Usia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan mengenai kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan penelitian. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan

mempermudah tingkat dari analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak ada harus dilakukan, maka usia menjadi hal yang berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan terkaitan antar umur dan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka tabel di bawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.II : Identitas informan dalam penelitian fungsi unit pelaksanaan teknis (UPT) Terminal dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan terminal duri bestari di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	25-35	1	25%
2.	35-45	-	-
3.	45-55	3	75%
Jumlah			100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang terdiri dari kepala UPT Kabupaten bengkalis, Anggota UPT Terminal, Supir angkutan, Masyarakat pengguna angkutan . terdiri dari 1 orang dengan kriteria umur 25-35 tahun dengan persentase 25% dan 3 orang dengan kriteria 45-55 tahun dengan persentase 75%.

2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak dapat mempengaruhi kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan informasi atau jawaban yang benar adanya. Jenis kelamin informan juga tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian di karenakan jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan atau pedoman untuk menentukan sebuah pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah dari penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.III : Identitas informan dalam penelitian fungsi unit pelaksanaan teknis (UPT) Terminal dinas perhubungan dalam pengawasan terminal dari bestari di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis .

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	3	75%
2.	Wanita	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui informan yang terdiri dari dinaskepala UPT Kabupaen bengkalis, Anggota UPT Terminal, Supir angkutan, Masyarakat pengguna angkutan. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 3 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 75% dan 1 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 25%.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informasi dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara informan satu dengan yang lainnya perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman informan juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui .

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di UPT Terminal kabupaten Bengkalis. Dilihat dari tingkat pendidikan informan dalam penelitian tentang fungsi unit pelaksanaan teknis (UPT) Terminal dinas perhubungan dalam pengawasan terminal duri bestari di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis. Yaitu sebagai berikut :

Tabel V.IV : Identitas informan dalam penelitian fungsi unit pelaksanaan teknis (UPT) Terminal dinas perhubungan dalam pengawasan terminal duri bestari di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	75%
4.	Diploma III (D3)	-	-

5.	Strata 1 (S1)	1	25%
6.	Magister (S2)	-	-
7.	Doktor (S3)	-	-
	Jumlah	4	100%

Sumber: Data olahan peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa informan yang terdiri dari kepala UPT Kabupaten Bengkalis, Anggota UPT Terminal, Supir angkutan, Masyarakat pengguna angkutan. Berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 1 orang berpendidikan strata 1 (S1) dengan persentase 25%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 orang dengan persentase 75%

B. Hasil Penelitian Tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota serta meningkatnya kebutuhan ekonomi, salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi terutama jasa transportasi angkutan jalan raya, transportasi itu sendiri berfungsi untuk mengangkut penumpang/barang dari satu tempat ke tempat lain. Karena kota merupakan tempat atau pusat aktivitas masyarakat daerah yang menjadi pengaruhnya, dimana kota juga merupakan konsentrasi penduduk dengan berbagai macam kegiatan, yaitu dibidang administrasi, politik,

ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan oleh karenanya kota banyak dikunjungi oleh kaum urban. Dengan demikian kota merupakan wadah tempat tinggal atau pemukiman, kesempatan kerja, dan kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut mobilitas masyarakat banyak terpusat ke kota dengan segala aktivitas tersebut dan dengan sendirinya kebutuhan akan transportasi, terutama transportasi angkutan darat yaitu angkutan jalan raya dari daerah-daerah yang dipengaruhinya menuju kota merupakan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa angkutan atau transportasi penyedia jasa angkutan transportasi dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat mobilitas masyarakat yang tertib dan teratur dan tidak adanya hambatan dalam bidang transportasi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya suatu wilayah karena dengan transportasi daerah atau suatu wilayah dapat membuka keterisolasian daerahnya dan letak secara geografis yang sangat strategis.

Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak di capai oleh UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua *stakeholder*. Sehingga nantinya akan terwujud suasana transportasi yang harmonis di wilayah Kabupaten Bengkalis. Demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang/barang maka perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu terhadap

pengguna jalan lainnya.

Sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagian keempat Pasal 33 Ayat (1), “untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal”. Dan kemudian pada Perda Kabupaten Bengkalis nomor 15 tahun 2001 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 3 Ayat (8), “Dilarang bagi kendaraan penumpang umum dan atau barang untuk berhenti dan menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau barang diluar terminal, pangkalan, dan tempat pemberhentian sebagaimana ditetapkan sesuai peruntukannya”. Salah satu sarana dan prasarana yang paling penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah pembangunan terminal.

Salah satu terminal yang ada di kabupaten Bengkalis adalah Terminal Duri Bestari yang terletak di kecamatan Mandau. Terminal Duri Bestari didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk berpergian dan memperlancar arus kendaraan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi jumlah transportasi umum yang di sumbangkan.

1. Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan,

yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. (Donnelly, 1996)

Untuk melihat fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dilihat dari indikator pengawasan pendahulu dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Terminal Masmendapria,SH pada tanggal 03 Mei 2021. Tentang pengawasan yang di lakukan oleh UPT dalam setiap aktivitas terminal, yang hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“mengenai pengawasna yang dilakukan upt terhadap setiap aktivitas terminal itu sudah berjalan dengan cukup baik di karnakan pengawasan yang telah dilakukan sudah berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada anggota petugas untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jadi dalam melakukan pengawsan itu sudah merupakan tugas dari petugas dengan dasar aturan yang telah

ditetapkan.”

Selanjutnya terkait pengelolaan UPT dalam pengawasan terminal duri berstari di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis, Bapak Binsar Simanjuntak sebagai petugas UPT Terminal memberikan pernyataanya bahwa :

“dalam pengelolaan upt terkait pengawasan yang mana upt mempunyai tugas dalam mengawasi melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan pengelolan terminal, melaksanakan pengaturan sirkulasi kendaraan dan orang dalam terminal, melaksanakan pengaturan penggunaan fasilitas terminal, memantau keselamatan angkutan di terminal, melaksanakan pengaturan jadwal pemberangkatan kendaraan, melaksanakan pengelolaan fasilitas penunjang terminal, melaksanakan pemungutan retribusi terminal, melaksanakan pemeliharaan terminal beserta fasilitas penunjangnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas”

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan salah satu supir angkut bpk Mahmud , mengenai penerapan peraturan yang telah di tetapkan oleh dinas perhubungan dalam pengawasan terminal duri di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam Perda nomor 8 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis jelas dsebutkan perintah



terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu personil/petugas pengawasan dan pengendalian terminal akan ditempatkan di lokasi/pos yang telah ditentukan dan difasilitasi dengan sebuah meja yang berfungsi untuk pelayanan pengaduan/informasi dan pengawasan serta melaksanakan mobile/patrol di dalam area terminal, pos sebagaimana dimaksud akan ditempati oleh 2 (dua) orang personil tiap shift”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai masyarakat yang pernah menjadi penumpang yang bernama bpk ridwan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“dalam pengawasn dan pengelolaan terminal menurut saya masih kurang optimal yang mana saya melihat bahwa dalam pengelolaan dan pengawasan masih kekurangan SDM yang bekerja dalam bidang tersebut sehingga ini mempengaruhi fungsi dari UPT itu dalam pengawasn termina”

Jadi dapat disimpulkan berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti key informan dan informan mengenai fungsi Unit Pelaksanaan Terminal (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana fungsi UPT dalam pengawasan terminal masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik ada beberapa kekurangan diantaranya yaitu masih kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan

sehingga ini mempengaruhi fungsi dari UPT.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada hari senin 03 Mei 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator pengawasan pendahuluan terhadap fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sejauh ini fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih kurang baik yang mana dalam pengelolaan dan pengawasan masih kekurangan sdm yang bekerja dalam bidang tersebut sehingga ini mempengaruhi fungsi dari upt itu dalam pengawasan terminal.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pengawasan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Donnelly, 1996)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Terminal Masmendapria, SH pada tanggal 03 Mei 2021. Mengenai bentuk-bentuk



pengawasan terminal yang dilakukan UPT, yang hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Salah satunya merupakan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan meminta laporan penerimaan retribusi Kabid Keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi terminal dan juga melakukan pengawasan terhadap benda berharga (Tiket) perbulannya melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Dinas terkait melakukan pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan penerimaan retribusi perbulannya kemudian dievaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam proses pemungutan retribusi dan dalam laporan penerimaan pemungutan retribusi dilakukan dengan menghitung jumlah tiket yang keluar.”

Selanjutnya Bapak Binsar Simanjuntak sebagai petugas UPT Terminal juga berpendapat bahwa :

“Selain pengawasan mereka juga melakukan hal yang lainnya bias kita lihat fungsi dari pos yang ada di terminal yang mana ditempati oleh 2 (dua) orang personil tiap shift, diantaranya Melakukan pengawasan, Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung/ penumpang, Menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan pengunjung/penumpang, Memberikan bantuan



pengamanan secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang dapat mengganggu ketertiban didalam terminal, mengisi buku aktifitas harian. Selain menempati POS yang di tetapkan, personil pengawasan dan pengendalian juga melakukan patroli rutin secara berkala didalam lingkungan terminal, yang berfungsi untuk Memantau dan memperhatikan secara langsung kondisi terminal, Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung/penumpang melalui informasi, Menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan pengunjung/penumpang, Memberikan bantuan pengamanan secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang dapat mengganggu ketertiban didalam terminal."

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan salah satu supir angkut bpk Mahmud , mengenai bentuk teguran yang dilakukan untuk para angkuran bias menaik dan menurunkan angkuran di terminal yang telah di tetapkan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

"Dalam permasalahan saat ini para tim operasional terminal ini melakukan penilangan dan penyitaan terhadap angkutan umum yang melakukan pelanggaran khususnya tidak mentaati peraturan.namun yang menjadi alasan para kami sebagai supir angkut mengapa tidak ingin beroperasi di terminal yang telah di tetapkan itu karena fasilitas prasarana yang masih kurang dalam

pemenuhan kebutuhan penumpang supir sehingga membuat para supir dan masyarakat kurang ingin ke terminal yang telah disediakan.”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai masyarakat yang pernah menjadi penumpang yang bernama ibu Risma, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“saya sebagai penumpang memang kurang berminat untuk pergi ke terminal untuk mencari angkutan yang mana saya kurang nyaman dengan tempat yang disediakan untuk kami yang nantinya akan menunggu keberangkatan”

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informen dan informan di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada hari senin 03 Mei 2021, mengenai indikator pengawasan pada saat kerja berlangsung terhadap fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Diri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. disini dapat dilihat bahwa pengawasn pada saat kerja berlangsung dalam hal bentuk pengawasn yang telah dilakukan sudah cukup baik sesuai dengan apa yang telah di tentukan, namun dalam hal bentuk teguran yang dilakukan yang mana bentuk tegurannya ialah penilangan dan penyitaan. Yang menjadi penyebab terjadinya penurunan penumpang di luar terminal ialah atas keinginan masyarakat itu sendiri yang mana masyarakat mengatakan bahwa mereka kurang nyaman

berada di terminal karna tempat dan fasilitas yang kurang mencukupi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada hari senin 03 Mei 2021, peneliti melihat dari indikator pengawasan pada saat kerja berlangsung terhadap bentuk-bentuk pengawasan yang ada di terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang sudah dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah begitu juga bentuk teguran yang dilakukan apa bila para supir menaikan dan menurunkan penumpang diluar terminal maka itu lakukan penilangan angkutan. Sedangkan sikap masyarakat yang tidak ingin keterterminal yang menyebabkan para supir menurunkan mereka di luar terminal.

3. Pengawasan feed back (*feed back control*)

Pengawasan feed back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditunjukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi actual. Pengawasan feed back adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. (Donnelly, 1996)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Terminal Masmendapria,SH pada tanggal 03 Mei 2021. Mengenai evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan oprasional terminal , yang hasil wawancara

yaitu sebagai berikut :

“bentuk evaluasi yang dilakukan ialah diadakannya pembinaan agar adanya pengurangan terhadap para angkutan yang menurunkan dsan menaikkan penumpang di luar terminal, namun pembinaan ini memang berjalan masih kurang baik .”

Selanjutnya Bapak Binsar Simanjuntak sebagai petugas UPT Terminal mengenai petugas lapangan dalam pengawasn kerja di lapangan, beliau menyatakan bahwa :

“pada saat ini pelaksanaan pengawasan di lapngan efektif yang mana telah membawa dampak yang baik bagi organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan perencanaan yang telah di tetapkan yang berguna agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah di tetapkan serta dengan mudah mengetahui kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan agar dapat di evaluasi dan di ambil tindakan alternative berikutnya secara tepat. Banyak yang harus diperhatikan lagi dalam penataan terminal ini, tapi kami akan selalu berusaha untuk lebih memperbaiki fungsi terminal agar lebih baik operasionalnya.”

Selanjutnya salah satu supir angkut bpk Mahmud juga menyatakan sebagai berikut :

“ Petugas di lapangan sudah bekerja dengan cukup baik namun hanya saja masih kurang SDM di terminal dalam mengelola fasilitas

yang ada di terminal”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai masyarakat yang pernah menjadi penumpang yang bernama ibu Risma mengenai tariff yang di ambil dari setiap penumpang, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“untuk tariff yang dikeluarkan itu sama saja dengan tariff di loket terminal jadi tidak ada perbedaan ”

Jadi dapat disimpulkan berdasrakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informen dan informan di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada hari senin 03 Mei 2021, mengenai indikator pengawasan feed back terhadap fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Diri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. disini dapat dilihat bahwa salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan adalah pembinaan, namun kegiatan ini masih kurang berjalan dengan baik. Kemudian untuk pengawasan dilapangan dan tariff yang diambil di luar terminal itu sama saja tidak ada perbedaan.

Berdasarkan hasil obsrvasi yang peneliti lakukan di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada hari senin 03 Mei 2021, peneliti melihat dari indicator pengawasan feed back terhadap bentuk evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan operasional di terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang mana masih kurang kegiatan pembinaan ini sehingga masih terjadinya menaikkan

dan menurunkan penumpang tidak di terminal yang telah disediakan.

A. Hambatan Dalam Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Terminal Duri Bestari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, bahwasannya hambatan yang terdapat dalam Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Kurang mendukungnya fasilitas yang disediakan sehingga sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk naik dan turun di terminal.
2. Sikap masyarakat yang tidak peduli adanya terminal membuat terminal tidak beroperasi dengan baik
3. Sumber daya manusia yang ada di terminal masih kurang sehingga perlunya penambahan SDM agar terminal bisa lebih terawat
4. Kegiatan pembinaan yang kurang aktif membuat pemanfaat terhadap adanya terminal kurang baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kamukakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:



Dalam Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih kurang baik dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih kurang maksimal dilihat dari indikator pengawasan pendahuluan, dalam pengelolaan terminal dalam pengawasan yang memiliki hambatan yaitu kurangnya Sumber daya manusia yang ada di terminal masih kurang sehingga perlunya penambahan SDM agar terminal bisa lebih terawatt. Dari indikator pengawasan pada saat kerja berlangsung, terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tidak beroperasi dengan baik di karnakan sikap masyarakat yang kurang memanfaatkan adanya terminal yang mana ini di karnakan fasilitas yang disediakan terminal belum memenuhi kebutuhan penumpang. Indikator pengawasan feed back, yang mana kepedulian UPT dan dinas perhubungan masih kurang seperti kegiatan pembinaan yang kurang aktif.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan dalam pengawasan Terminal Duri Bestari Di Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap fungsi terminal angkutan umum hendaknya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mempunyai standart pengawasan yang jelas, penilaian yang jelas dan melaksanakan evaluasi rutin terhadap pengawasan yang telah dilakukan.
2. Seharusnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dapat menindak secara lebih tegas terhadap supir angkutan umum yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera dari supir angkutan umum tersebut.
3. Sebaiknya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis serta UPT Terminal juga memberikan himbauan dan anjuran kepada setiap calon penumpang angkutan umum AKAP maupun AKDP untuk dapat memilih angkutan umum yang ingin dituju didalam terminal saja, sehingga mengurangi kesempatan pihak angkutan umum AKAP dan AKDP mencari penumpang diluar terminal ataupun di jalan. Hal ini juga tentunya harus ada jaminan keamanan dan pelayanan yang memuaskan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ataupun dari PO angkutan umum.
4. Sebaiknya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai pengelola terminal menyediakan loket penjualan tiket yang sedikit lebih luas dari yang sekarang sehingga PO angkutan umum dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon penumpang

dan jaminan keamanan barang yang dibawa oleh penumpang. Kondisi ini tentunya akan menciptakan ketertiban bagi para PO angkutan umum dalam memberikan pelayanan, sehingga PO juga tidak perlu membuka loket yang sama diluar terminal dan loket yang sudah disediakan di terminal pun dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh PO angkutan umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, Kebijakan Public : Teori Dan Proses Edisi Revisi, Media Persindo. Yogyakarta. 2007
- Duun, 2003, Analisis Kebijakan Public, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Fahmi, Irham.2013.*Prilaku Organisasi. Teori,Aplikasi Dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Hutama,2009,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Rineka Cipta,Jakarta
- Handyaningrat, Suhardi. 2014. *Optimalisasi Kinerja Lembaga Pemerintahan*, Surabaya: Buana Ilmu.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Pustaka Quantum, Jakarta
- Indra Bastian, 2002, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Birokrasi Dan E-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kansil Dan Cristine, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Moctar Kusumaatmadja
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Pt Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sector Public*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, 2007, *Teori Dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Siswanto, Bedjo, 2005, *Manajemen Modern*, Sinar Baru, Bandung
- Siagian,Sondang P,2003, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*.Pt Rineka Cipta Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- Santoso, 2004, *Birokrai Pemerintahan Orde Baru Prespektif Kultural dan Structural*, Jakarta, Bina Aksara
- Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung PT. Refika Aditama
- Taliziduhu Ndraha, 2015, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, PT Rineka Cipta Jakarta
- Projodikoro, 2001, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, Bandung, PT.

Eresco

DOKUMENTASI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Fisipol UIR. 2013. Buku pedoman penulis usulan penelitian , skripsi dan kertas kerja mahasiswa, pekanbaru. Fisipol UIR.

JURNAL

Muhammad Rangga Sudrajat. *Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

Ria Apriliyani Putri, Rahmat Hidayat, Siti Khumayah. *Analisis Pengawasan Kepala Terminal Untuk Operasional Fungsi Terminal Sumber Di Kabupaten Cirebon*, Vol. 2 No. 2 Desember 2014

Bengkaliskab.go.i